

### BAB III

#### ANALISA SOLUSI PENYELESAIAN KONFLIK DI THAILAND SELATAN: MELALUI PENDEKATAN TEORI *COLLECTIVE IDENTITY*

Pada bab ini akan membahas terkait analisa konflik di Thailand Selatan melalui teori *collective identity* sebagai alternative penyelesaian konflik yang telah berjarak sekitar 15 tahun dan telah merugikan masyarakat di wilayah Thailand Selatan. Konflik ini mengakibatkan dampak negatif terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat serta memunculkan pemberontak baru atau *New round of violence*.

Fenomena *New round of violence* mulai pada tanggal 4 Januari 2004 (perompakan senjata), dibawah kepemimpinan perdana menteri Thaksin Shinawatra, ia menargetkan solusi konflik kepada pemain yang mengatur di belakang yaitu kelompok separatisme “Bersatu” yang mengadakan pembicara secara sembunyi *Peace talk* dengan wakil separatis Dr. Kader Jehman. Pemerintah berkali-kali mengadakan pembicara tersebut, hingga munculnya *Peace plan* pada tahun 2006.

*Peace plan* tersebut ditandatangani oleh semua wakil kelompok separatisme di bawah payungnya “Bersatu” yaitu Ustaz Muhammad bin Abdul Rahman presiden grup GGP, Mrs. Rossi bin Hassan wakil presiden grup PULO, Ustaz Abdullah bin Ismail presiden grup BRN, yang terakhir adalah Dr. Kader Jehman yaitu presiden

kelompok Bersatu. Akan tetapi, semua rencana tersebut gagal karena departemen keamanan Thailand telah menilaikan bahwa gerakan-gerakan ini bukan lagi mesin utama yang mendorong *New round of violence* sejak insiden perampokan senjata tahun 2004.

Kegagalan pemerintah dalam mengatasi kekerasan sehari-hari dalam bernegosiasi dengan wakil-wakil “Bersatu” menyebabkan pemerintah pusat mengelompokkan kelompok “Bersatu” menjadi “*old group*” yang tidak mempengaruhi kepada situasi kekerasan sehari-hari zaman sekarang lagi. Pada beberapa tahun ini *New round of violence* diklasifikasi oleh pemerintah menjadi para “pemberontak”. Pemberontak *New round of violence* adalah kelompok gelombang baru yang dijalankan oleh remaja-remaja ekstrimis, dimana merupakan konsekuensi dari kesalahan kebijakan oleh pemerintah pusat [CITATION Pak14 \l 1033 ].

Dampak konflik yang dirasakan menurut hasil *Peace Survey* oleh *Southern Conflict and Cultural Diversity Research Institute Prince of Songkla University* dengan mengumpulkan data dari masyarakat dan para pemimpin lokal mengatakan bahwa dampak yang ditemukan dibawah situasi konflik adalah dampak perekonomian yang tidak ada investor yang ingin menginvestasi di tiga provinsi Selatan, termasuk kekurangan pekerjaan dikarenakan perekonomian tidak stabil, kekurangan keterampilan menyebabkan pendapatan masyarakat di provinsi Selatan masih rendah. Namun, dampak yang paling dirasakan oleh masyarakat dan pemimpin lokal adalah dampak keamanan dan properti. Kemudian dampak tertinggi yang dialami oleh para pemimpin adalah dampak kesehatan dan mental. Pada masalah

kehidupan sehari-hari hasil masyarakat lokal dan para pemimpin lokal memiliki perasaan tidak aman jika ingin keluar dari tempat tinggal [CITATION Chu17 \l 1033 ].

Menurut Dr. Panitan Wattanayakorn, sarjana keamanan dari Universitas Chulalongkorn, memberi pendapat tentang konflik di wilayah tiga provinsi Selatan bahwa kekerasan yang terjadi di masa lalu telah menciptakan dua gambaran yang tumpang tindih. Pertama, masyarakat tidak percaya dengan keselamatan, yang ke dua adalah gambaran pejabat pemerintah yang tidak dapat melindungi masyarakat. Karena lebih sulit melindungi diri sendiri, menyebabkan harapan masyarakat terhadap pejabat pemerintah dalam melindungi mereka berkurang.

### **3. Analisa konflik dan solusi konflik melalui pendekatan *collective identity***

Telah dijelaskan bahwa konflik di Thailand Selatan tidak begitu mudah dalam memahaminya, karena konfliknya telah memakan waktu jangka panjang hingga sekarang belum dapat diselesaikan. Dalam sub bab ini peneliti akan mencoba untuk menyesuaikan teori *collective identity* dengan kondisi konflik di Thailand Selatan dan memberi pandangan dari konstruktivis yang perlu dipelajari oleh pemerintah.

**(3.1) *constitutive norms*** atau norma-norma hukum-politik dan sosial-budaya yang telah dikembangkan oleh Thailand seperti saling menghormati, mengikuti hukum yang telah ditentukan dengan adil, menghormati hak asasi manusia, menghormati hukum moral yaitu saling memahami perbedaan dan menghindari kekerasan.

Pada hasil wawancara dari mantan presiden kelompok separatis *old group* dapat dipahami bahwa sebelumnya pemerintah pusat tidak begitu serius dalam menyelesaikan konflik, contohnya pemerintah mengeluarkan hukum khusus di tiga provinsi Selatan yang memberikan hak wewenang berlebihan kepada pejabat pemerintah. Disini tidak sedikit pejabat pemerintah melanggar hak asasi manusia masyarakat. Kemudian, termasuk juga kebijakan menurunkan tentara ke tiga provinsi Selatan, disini dapat dilihat bahwa pemerintah masih diskriminasi dengan masyarakat Melayu (*have no trust each other*), menurunkan tentara kepada tiga provinsi Selatan membuat masyarakat Selatan merasa bahwa pemerintah memandang situasi Thailand Selatan sebagai ancaman stabilitas yang perlu dingatasi oleh tentara, padahal mayoritas masyarakat Melayu bukan kelompok separatisme [CITATION Dee11 \1033 ].

Namun, telah banyak penelitian yang menawarkan penyelesaian konflik dengan memberikan otonomi khusus kepada tiga provinsi Selatan. Berdasarkan salah satu penelitian yang di tuliskan oleh Duncan McCargo, 2008 yang berjudul *Tearing Apart the Land: Islam and legitimacy in Southern Thailand* [ CITATION Dun12 \1033 ]. Dan *Mapping National Anxieties: Thailand's Southern conflict* tahun 2009 dapat disimpulkan bahwa McCargo menawarkan pemerintah untuk memberi otonomi kepada tiga provinsi Selatan [ CITATION Mcc09 \1033 ].

Dari hasil wawancara mantan presiden kelompok separatis *old group*, ketika dipertanyakan tentang otonomi khusus, ia bertentangan dengan otonomi khusus karena, otonomi khusus tidak dapat menyelesaikan masalah, lebih dari itu akan

menciptakan lebih banyak masalah karena otonomi khusus akan mendukung mereka (Gerakan pemberontak baru) sebagai langkah pertama sebelum melangkah ke memisahkan diri yang merupakan hal yang tidak diinginkan oleh pemerintah.

Isu tersebut terdapat dua dimensi, pertama telah kita memahami bersama bahwa gerakan pemberontak baru memiliki tujuan untuk memisahkan diri, dimana hal tersebut sangat bertentangan oleh pemerintah pusat. Kedua, otonomi khusus bukan upaya yang diinginkan oleh masyarakat Patani, karena otonomi khusus menurut masyarakat Patani bukan hal yang mudah dalam membentuknya, otonomi khusus tersebut butuh pemimpin, dan kebutuhan pemimpin tersebut mudah saja munculnya konflik antar masyarakat Melayu sendiri. Sedangkan hasil penilaian oleh *Southern Conflict and Cultural Diversity Research Institute Prince of Songkla University* 2018, menyebutkan hasil keinginan masyarakat untuk mengadakan otonomi khusus di sekitar 10.9% saja. Solusi paling efektif adalah pemerintah Thailand harus membuat kebijakan yang diinginkan masyarakat Melayu yang mayoritas masyarakat ingin adalah “memahami bersama” atau solusi-solusi yang berkelanjutan [CITATION Chu17 \I 1033 ].

Pada tahap *constitutive norms*, langkah yang penting bagi pemerintah dalam menyelesaikan masalah adalah saling memahami dan menghormati, peneliti mencoba untuk memberikan saran upaya yang mungkin dapat dilakukan oleh pemerintah, sebagai berikut :

3.1.1. Mencabutkan atau mengurangi tentara dari tiga provinsi Selatan, hal ini peneliti telah mewawancarai masyarakat, hasil dari mayoritas masyarakat setuju bahwa mereka ingin pemerintah mencabutkan tentara, karena adanya tentara tersebut mereka lebih merasa tidak aman dengan adanya tentara, hak-hak kebebasan mereka terganggu. Seperti adanya kamp-kamp tentara di setiap satu kilometer di pinggir jalan yang bertugas untuk memeriksa masyarakat. Adanya tentara tersebut masyarakat didiskriminasi oleh pemerintah yang memandang situasi di tiga provinsi selatan sebagai ancaman. Namun, keadaan tentara mengganggu kehidupan sehari-hari masyarakat, sebaliknya keadaan tentara tersebut tidak memberikan perasaan aman kepada masyarakat.

Namun, anggaran negara untuk wilayah tiga provinsi Selatan sebenarnya memiliki jumlah yang besar. Akan tetapi, penggunaan dana tersebut tidak disampaikan kepada masyarakat karena dana tersebut hanya untuk gaji tentara. Membuat anggaran dari pemerintah tidak berdampak positif bagi masyarakat.

3.1.2. Menbatalkan hukum khusus yang memberikan hak wewenang berlebihan kepada pejabat pemerintah, hukum ini telah dicatat oleh organisasi *Human Right Watch* bahwa melanggar hak asasi manusia masyarakat di tiga provinsi Selatan, karena telah banyak pejabat pemerintah menangkap dan menyiksa masyarakat tanpa bukti kesalahan yang nyata dibawah hukum khusus tersebut.

Dari hasil wawancara, peneliti menemukan bahwa masyarakat merasa diskriminasi dengan adanya hukum ini, karena hukum khusus tersebut tidak

menghormati hak asasi manusia dan menurut mayoritas masyarakat mengatakan bahwa hukum ini bukan cara penyelesaian konflik yang tepat. beberapa masyarakat mengatakan bahwa adanya hukum ini semakin menambah perasaan diskriminasi. Tidak sedikit masyarakat ditangkap ke kamp tentara tanpa bukti kesalahan yang nyata, seperti kasus besar-besaran pada bulan Agustus 2019 yang lalu, Abdullah E-musa di distrik Saiburi, provinsi Pattani, ia ditangkap ke kamp tentara karena ia tersangka sebagai pendukung pihak pemberontak. Setelah keluar dari kamp tentara, Abdullah dengan kondisi kekurangan oksigen akhirnya meninggal. Dari hasil wawancara saudara Abdulah di berita, ia mengatakan bahwa di distrik Saiburi merupakan “wilayah merah”, siapa yang kondisinya sedang berkerja terutama laki-laki, mau tidak mau harus bersiap untuk ditangkap [CITATION Kha19 \ 1033 ].

Pada kasus di atas dapat dianalisa bahwa, strategi pemerintah kurang fleksible. Dapat dilihat dari hasil wawancara Jenderal Waipoch bahwa pemerintah hanya melihat ancaman di tiga provinsi Selatan sebagai *Traditinal Threat* maka hasil strateginya adalah menurunkan tentara dan mengeluarkan hukum khusus yang memaksa masyarakat dalam kehidupan sehari-harinya. Suatu hal yang menjadi masalah adalah pemerintah yang terlibat dalam membentuk strateginya, tidak memahami situasi yang sebenarnya dan tidak memahami keinginan masyarakat lokal, karena pemimpin provinsi seperti gubernur selalu merupakan orang dari luar provinsi Selatan [CITATION Dee11 \ 1033 ].

Dari hasil wawancara oleh Kepala Desa dari provinsu Pattani, bahwa beliau sebagai kepala desa yang memahami masalah konflik dan usaha untuk mengajukan

keinginan masyarakat kepada pemerintah pusat, tetapi akhirnya hal-hal yang diajukan tidak dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah masih tetap menggunakan strategi sebelumnya, padahal yang menjadi masalah sekarang bukan masalah tradisional lagi. Pemerintah tidak ingin mengdesentralisasi strateginya, seperti yang dikatakan oleh Jenderal Waipoch bahwa strategi *one size fit all* bukan cara yang paling tepat dalam menyelesaikan konflik yang kompleks di tiga provinsi Selatan. Masalah yang perlu diselesaikan oleh pemerintah adalah memenangkan perasaan masyarakat.

Menurut pandangan Jenderal Waipoch, terlihat bahwa salah satu kekurangan utama untuk perumusan strategi yang benar belum terbentuk yaitu kemauan pemerintah atau *Political Will*. *Political Will* itu penting terbentuk bagi pemerintah untuk lebih minat dalam menyelesaikan konflik. Ketika kehendak pemerintah atau *Political Will* berkurang, maka kualitas penyelesaian konflik juga terdapat berkurang.

Dari berbagai hasil wawancara, peneliti menemukan jawaban yang menyatakan bahwa pemerintah kurang serius dalam menyelesaikan masalah yang sebenarnya ada solusinya. Selama ini pemerintah mengeluarkan strategi atau kebijakan yang kurang diterima oleh masyarakat. Meskipun telah ada beberapa kebijakan yang menyenangkan masyarakat seperti memberi dana untuk haji dan memberi subsidi untuk keluarga korban konflik. Kebijakan tersebut bukan penyelesaian dari akar masalahnya tetapi dari puncak masalah. Keinginnan masyarakat sebenarnya adalah kesamaan, keadilan, dan saling menghormati. Pemerintah sendiri belum memberikan perhatian tentang hal tersebut karena tidak saling memahami (*have no trust each other*) [CITATION Dee11 \l 1033 ].

Menurut Jenderal Ekachai Srivilat, Direktur Biro Perdamaian dan Pemerintahan Institut Raja Prajadhipok, ia telah melakukan proses pembicaraan damai selama bertahun-tahun, di tiga provinsi Selatan dan daerah berkonflik lainnya di seluruh dunia. Ia mengatakan bahwa pemerintah harus memiliki proses negosiasi yang tepat dan memiliki struktur kerja yang jelas, dengan dukungan akademik dan masyarakat sipil sepenuhnya. Akan tetapi, proses yang dilakukan oleh pemerintah belum memiliki implimentasi yang tepat. Jenderal Ekachai menjelaskan bahwa proses perdamaian dunia memiliki tiga bagian:

Pertama, struktur kelompok kerja harus lengkap. Termasuk Badan Intelijen Nasional, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kekeadilan dan lainnya, bukan memiliki jumlah pekerja hanya beberapa orang. Kedua, struktur pekerjaan harus tersedia secara luas di semua tingkatan yaitu harus mendengarkan pendapat orang-orang pada saat yang sama, karena tidak ada masalah di dunia ini yang berbicara dengan 4-5 orang bahkan selesai. Ketiga, Harus ada proses kerja yang baik dengan rencana yang jelas, dimulai dengan membangun kepercayaan terlebih dahulu. Bukannya tahap pertama bernegosiasi pemerintah langsung memberi panduan masyarakat untuk menurangi kekerasan, tanpa saling memahami [CITATION Off17 \1033 ].

Adapun dari pandangan konstruktivisme yang perlu dibentuk oleh pemerintah karena Dalam konflik, terdapat hubungan erat antara agen dan strukturnya. Struktur ini bukan sesuatu yang sudah ada dari dulu melainkan hasil dari pola yang terbentuk dari praktik sosial yang dilakukan berulang ulang oleh aktor/

agen-agen tersebut. Konsepsi negara atau pemerintah mengenai siapa mereka itu dan apa keinginan yang mereka inginkan berkaitan dengan identitas yang diperoleh dari struktur yang dimaknai bersama secara intersubjektif, dan bukannya melalui pembentukan interaksi sosial sebelumnya.

Hal ini menunjukkan bagaimana kepentingan suatu negara menjadi acuan utama sehingga negara sedemikian rupa bekerjasama dengan rakyat maupun struktur-struktur dalam masyarakat untuk pencapaian hal ini. Perilaku sosial seperti yang terjadi dalam konflik digerakan oleh norma yang memiliki ikatan kuat dengan negara tersebut sehingga norma ini memiliki peranan yang penting dalam menjadi panduan bagi negara dalam menentukan sikap sikap maupun strategi strategi yang akan diambil.

**(3.2) *social purposes*** adalah keinginan bersama untuk mencapai kepada target yang diinginkan bersama seperti kesamaan, kebebasan, perdamaian, sejahtera, stabilitas ekonomi dan stabilitas politik.

Pada zaman globalisasi negara menghadapi tantangan berbagai masalah selain masalah tradisional juga masalah non-tradisional seperti masalah narkoba, ketidak stabilan ekonomi global, masalah cyber dan climate change. Semua masalah yang telah disebutkan, bukan hanya pemerintah yang akan mendapat dampak tetapi semua masyarakat Thailand, baik Wilayah Selatan atau Utara pasti akan mengalaminya.

Keinginan masyarakat tidak terlepas dari perdamaian dan kesejahteraan. Namun, telah peneliti menunjukkan tabel jumlah kekerasan di tiga provinsi Selatan

memiliki jumlah yang tinggi, termasuk perekonomian dan tingkat pekerjaan biasa maupun birokrat yang masih rendah karena kurang pendidikan. Hal terbesar merupakan masalah yang ingin dikembangkan oleh pemerintah selain mengurangi kekerasan. Berdasarkan *Southern Border Development Plan: National Economic and Social Development Plan (2017 - 2021)* sebagai berikut :

3.2.1. *Security*, stabilitas negara, masyarakat sejahtera,

3.2.2 *Social Cohesion and Just Society*, Ciptakan keadilan Mengurangi ketimpangan di setiap dimensi,

3.2.3. *Competitiveness*, meningkatkan tingkat kompetisi yang berkualitas,

3.2.4. *Enhancement Human Capital Development and Strengthening*, memberkembangkan sumberdaya manusia yang berkualitas pada berbagai dimensi,

3.2.5. *Good Governance*, pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat,

3.2.6. *Sustainable Development and Growth*, berkembang, stabil, berkelanjutan di bidang ekonomi, politik dan kualitas hidup [CITATION Sou17 \l 1033 ].

Berdasarkan strategi nasional dapat dipahami bahwa tujuan dan keinginan pemerintah tidak berbeda dengan masyarakat yang ingin negara menjadi lebih berkualitas. Masalah yang dialami oleh masyarakat tiga provinsi selatan bukan sekedar kekerasan sehari-hari lagi, masalah narkoba dan kemiskinan merupakan masalah terbesar bagi masyarakat tiga provinsi Selatan. Faktor yang menyebabkan narkoba tidak lepas dari kekurangan pendidikan yang telah peneliti memberi tabel

pada bab dua bahwa pendidikan di tiga provinsi Selatan masih ditingkat yang rendah jika dibandingkan dengan provinsi lain. Tingkat pendidikan yang rendah karena masyarakat memiliki hambatan kemiskinan yang tidak mampu untuk mengantar anak-anaknya untuk sekolah. Berdasarkan hasil penilaian negara tahun 2017, wilayah tiga provinsi selatan memiliki kelemahan dan kekuatan sebagai berikut :

### *Weakness*

**3.2.1.1. Perekonomi memiliki tingkat pertumbuhan yang rendah,** karena ketergantungan pada sektor pertanian yang memiliki masalah efisiensi dan manajemen produksi. Sebagian besar petani adalah petani kecil dan masih memproduksi hasilnya secara tradisional. Teknologi dan inovasi dalam pengolahan digunakan untuk meningkatkan nilai produk pertanian masih rendah, termasuk kurangnya pengetahuan dalam manajemen produk yang sistematis.

Saran peneliti adalah pemerintah harus mengembangkan sektor industri dan inovasi di wilayah tiga provinsi Selatan seperti yang dikembangkan di wilayah lainnya. Karena selama ini di wilayah Timur dan utara telah memiliki inovasi yang cukup tinggi dibidang pertanian, karena pemerintah mengatarkan para ahli ke wilayah mereka. Sebaliknya di wilayah tiga provinsi Selatan pemerintah belum mengirimkan para ahli untuk memperkembangkan industri pertanian.

**3.2.1.2. Kekurangan tenaga kerja di sektor manufaktur,** kurangnya tenaga kerja disektor pertanian industri dan layanan, tenaga kerja terampil tidak sesuai dengan permintaan pasar.

Disini kembalikan kepada sistem pendidikan, terlihat jelas bahwa dikarenakan tingkat pendidikan yang rendah mengakibatkan kepada potensi yang rendah. Mengikuti strategi nasional *Enhancement Human Capital Development and Strengthening* yang merupakan keinginan pemerintah untuk meningkatkan kualitas masyarakat. Disini pemerintah perlu mengembangkan sektor pendidikan atau berkembang pendidikan kejuruan kepada warga lokal untuk mendapatkan peluang kemampuan yang lebih berkualitas dan sesuai dengan permintaan pasar.

### *Strengths*

**3.2.1.2.1. Kondisi topografis dan iklim,** yang cocok untuk produksi tanaman tropis. Terutama karet, kelapa sawit, dan merupakan daerah perikanan penting bagi negara.

**3.2.1.2.2. Proporsi anak-anak dan remaja sangat tinggi.** Mampu mengembangkan pengetahuan dan keterampilan untuk pekerja terampil dan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar dan mendukung pembangunan ekonomi di daerah.

**3.2.1.2.3. Wilayahnya memiliki tempat kosong yang cukup banyak** dan luas untuk mengembangkan agroindustri, seperti pengolahan karet, karet, kelapa sawit dan industri perikanan untuk ekspor. Terutama di distrik Nong Chik dan provinsi Pattani. Serta menjadi lokasi zona pengembangan ekonomi khusus di Narathiwat yang dapat menarik investasi untuk pembangunan ekonomi di daerah tersebut.

**3.2.1.2.4. Sumber daya alam dan ekosistemnya beragam** di daratan (Hutan Hala-Bala) dan laut (Pantai Talo Capo, Pantai Kaek, Provinsi Pattani dan Pantai Naratat provinsi Narathiwat). Termasuk tradisi budaya uniq dan beragam merupakan identitas

daerah. Hal ini mampu berkembang menjadi pariwisata ekowisata, sejarah dan budaya.

**3.2.1.2.5. Jaringan transportasi dapat terhubung baik di dalam maupun luar negeri.** Seperti pos pemeriksaan perbatasan, pelabuhan laut, kereta api dan bandara, serta kota perbatasan potensial (Betong Su-ngai Kolok) dapat menghubungkan pembangunan ekonomi dengan wilayah selatan, tengah, dan timur. Termasuk negara tetangga (Negara Bagian Kelantan dan Negara Bagian Perak, Malaysia)

*Opportunity*

**3.2.1.3.1. Pengembangan kerjasama internasional** seperti kerangka pengembangan zona ekonomi trilateral, Indonesia, Malaysia dan Thailand (IMT-GT), Program Pengembangan Bersama Thailand-Malaysia (JDA), Proyek Strategi Pengembangan Bersama untuk Wilayah Perbatasan Thailand-Malaysia (JDS), menciptakan peluang bagi Memperluas kerjasama dalam pembangunan ekonomi Infrastruktur untuk perdagangan dan investasi bersama

**3.2.1.3.2. Liberalisasi Perdagangan dan Komunitas Ekonomi ASEAN setelah 2015,** merupakan peluang bagi sektor manufaktur untuk memperluas pasar barang dan jasa di daerah tersebut Termasuk peluang untuk pengembangan transportasi dan logistik untuk terhubung di dalam kawasan untuk mendukung transportasi barang dan pariwisata negara-negara dengan kecenderungan semakin meningkat.

**3.2.1.3.3. Kemajuan dalam sains, teknologi, inovasi,** akan merupakan peran penting dalam pembangunan ekonomi untuk meningkatkan daya saing pada berbagai

sektor. Baik pertanian, industri dan jasa, serta mempengaruhi kualitas hidup dari pengembangan fasilitas untuk membuat hidup orang lebih sejahtera.

**3.2.1.3.4. Kebijakan pemerintah secara serius dan terus menerus berfokus pada resolusi kerusuhan** di tiga provinsi selatan. Merupakan faktor penting yang akan mengarah pada perdamaian di daerah dan peluang untuk pembangunan ekonomi dalam rangka menciptakan lapangan kerja dan menciptakan pendapatan bagi masyarakat. Termasuk pembangunan sosial untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berlejituan [CITATION Sou17 \l 1033 ].

Beberapa hal yang telah disebutkan merupakan keinginan pemerintah dan masyarakat terhadap wilayahnya yaitu perkembangan lebih lanjut terhadap sektor industri, inovasi agar menambahkan peluang kerja dan mengurangi kemiskinan yang sekarang di alami oleh masyarakat. Jika pemerintah dapat menerapkan strateginya yang direncanakan, kemajuan di wilayah tiga provinsi selatan tidak jauh lagi menemui kesejahteraan.

**(3.3) relational comparisons with other social categories** sebagai komparasi atau perbandingan secara relevan dalam menemukan penyelesaian dari kategori lain yang berupa perbandingan konflik yang dialami oleh suatu kelompok dengan kelompok lainnya untuk menghindari perlawanan secara fisik.

Dalam penyelesaian konflik setiap negara perlu belajar dari pengalaman sejarahnya atau pengalaman dari negara lain yang relevan dengan kasus yang dialami oleh negaranya. Konflik itu tidak muncul hanya di Thailand Selatan saja,

tetapi negara lain juga mengalami konflik. konflik tersebut ada beberapa negara berhasil dalam menyelesaikan dan masih ada beberapa negara gagal dalam menyelesaikan konflik. Pelajaran dari berbagai negara tersebut, akan merupakan model untuk pemerintah Thailand dalam menemukan kasus yang relevan dengan konfliknya, terutama tentang konflik identitas.

Di Thailand memiliki mayoritas populasinya berasal dari suku/ras yang sama, dan hanya 5% yang memiliki latar belakang yang berbeda. Jumlah tersebut merupakan angka yang kecil dibandingkan negara lainnya. Seperti Malaysia, Singapura, yang memiliki proporsi yang lebih tinggi. Termasuk Cina yang memiliki ras minoritas yang lebih dari setengah dari negaranya, Amerika memiliki populasi seluruh dunia. Maka pemerintah Thailand dapat belajar penyelesaian konflik identitas dari model-model tersebut.

Pemerintah Thailand perlu memahami lebih dalam tentang masalah kelompok minoritas dan perlu mempelajari tentang penyelesaian konflik keragaman. Seperti kasus dari Kuming, capital Yunan di Cina. Kunming terkenal sebagai tujuan wisata populer, Yunan adalah wilayah besar dengan populasi 40 juta orang, memiliki suku Hun (suku penduduk asli Yunan), dan adanya suatu kelompok minoritas lainnya seperti ThaiTibet dan suku pegunungan lainnya. Permerintah Cina telah berhasil dalam menemukan cara pengelolaan untuk semua kelompok minoritas dapat hidup berdampingan *co-exist* tanpa kekerasan. Di kampus *University of Nationality* di Kuming ini mahasiswa dari berbagai suku/ras mempelajari bersama, namun pelajaran mereka tentang keragaman suku/ras tanpa diskriminasi dalam posisi dan

promosi. Pengalaman dari Cina tidak hanya kasus dari kumming termasuk wilayah lainnya dapat dikatakan tertarik bagi pemerintah Thailand dalam mempelajarinya.

Kasus kedua adalah Malaysia, populasinya terdiri dari tiga suku/ras utama: Cina, Melayu dan Tamil. Pada awalnya tiga suku/ras tersebut tidak terintegrasi dengan baik, mereka telah berkonflik sejak awal kemerdekaan dan terjadinya kerusuhan. Namun, demikian, pemerintah berusaha untuk membuat *different group co-exist*. Meskipun suku Cina telah didiskriminasi, tetapi Malaysia tidak mengalami pemberontak seperti masa yang lalu lagi. Dan perlu dicatat bahwa ada sejumlah besar masyarakat Buddha-Thai yang masih tinggal di Malaysia Utara, mereka masih beragama Buddha, masih mempelajari bahasa Thai dan menjalani kehidupan sehari-hari mereka seperti orang Buddha biasa tanpa adanya masalah berbeda dengan situasi di Thailand Selatan. Ketiga, Singapura adalah salah satu negara yang berhasil dalam integrasi minoritas yang memiliki tiga ras yaitu: Cina, Melayu, Tamil. Singapura menunjukkan keberhasilannya dengan tanpa adanya pemberontak di negaranya [ CITATION Run07 \l 1033 ].

Pengalaman internasional akan merupakan bahan penambah pemahaman pemerintah Thailand termasuk masyarakat Thailand wilayah lainnya dalam memahami konflik di Thailand Selatan untuk menemukan cara yang lebih tepat dalam mengatasi konflik.

**(3.4) *cognitive models*** yaitu suatu kerangka kognitif yang perlu dibangun oleh pemerintah, supaya membangun kesadaran masyarakat atau untuk membentuk

kerangka pemikiran agar menghindari kesalahpahaman, baik antara masyarakat dan pemerintah, masyarakat dan masyarakat.

Pada hasil wawancara keinginan mayoritas masyarakat adalah pengakuan, perdamaian, dan kesamaan. Disini perlu diusahakan oleh pemerintah bahwa keinginan masyarakat sebenarnya bukan sekedar megurangi kekerasan sehari-hari saja, tetapi masyarakat juga ingin pengakuan dari pemerintah. Pada kasus sebelumnya yaitu setelah gelombang kekerasan pada tahun 2004, muncul banyaknya penelitian-penelitian yang menelitikan tentang situasi tersebut. Penelitian tentang politik dan sejarah Patani sebelum tahun 2004, tidak dapat diakui oleh pemerintah karena dikatakan oleh pemerintah penelitian-penelitian tersebut sebagai ancaman keamanan. Oleh karena itu, penelitian-penelitian yang membahas tentang “kebenaran” dan “kekuasaan” sangat dilarang oleh pemerintah.

Setelah insiden tahun 2004, munculnya suatu penelitian yang berjudul “Sejarah Patani” yang dituliskan oleh Ibrahim Sukree (2006), penelitian lokal ini merupakan salah satu penelitian penting dalam memahami sejarah Patani, pembahasan didalamnya merupakan hal yang tidak pernah dipelajari oleh orang Melayu sendiri. Penelitian ini dapat pengakuan dari masyarakat Melayu lebih dari pada pengakuan sejarah Thailand, kerana penelitian ini sebagai gambaran suku bangsa mereka. Tentu saja penelitian ini tidak diakui oleh pemerintah karena dari awal pemerintah tidak ingin mengakui bangsa Melayu. Beberapa buku dan penelitian yang membahas tentang sejarah Patani harus dilakukan dengan sembunyi karena

sering kali pemerintah menyatakan kepada peneliti atau penulis tentang sejarah Patani sebagai kelompok separatisme.

Berbeda dengan penelitian yang ditulis tentang Patani oleh orang non-Melayu, yang ditulis oleh Thanet Arponsuwan (2006), berjudul *Origins of Malay Muslim "Separatism" in Southern Thailand*, yang menulis tentang sejarah Patani dan separatisme. Penelitian ini dapat pengakuan dari pemerintah lebih dari pada penelitian masyarakat lokal. Perhatian pemerintah kepada masyarakat Melayu sangat berkurang bagi masyarakat Melayu, membuat masyarakat Melayu memiliki traumatis dengan pemerintah [CITATION Eka16 \l 1033 ].

Khongchai Hattha (2009), penulis buku tentang Patani secara komprehensif termasuk sejarah, ekonomi, politik dan suku bangsa. Penulisan Hattha tidak berbeda jauh dengan penulis lokal yang menuliskan tentang sejarah Patani. Hattha mengumpulkan informasi dari masyarakat lokal dan merumuskan menjadi saran dalam menyelesaikan masalah sebagai berikut :

3.4.1. Memberi perhatian terhadap sejarah lokal, terutama tentang sejarah Patani yang selama ini merupakan hal yang disembunyikan oleh pemerintah. Seperti beberapa penelitian dan buku-buku yang menulis tentang Patani oleh para ahli lokal, merupakan buku yang dilarang oleh pemerintah membuat masyarakat tidak dapat peluang untuk memahami dan mempelajari tentang sejarah Patani. oleh karena itu, organisasi sejarah lokal dan semua sektor terkait harus membentuk pengetahuan tentang Patani agar semua masyarakat seluruh Thailand mengetahui dan memahami.

3.4.2 Mempercepat dalam menciptakan kurikulum lokal, untuk menjadi alat pelajaran bagi guru lokal. Selama ini belum ada kurikulum terkait sejarah Patani yang diakui oleh semua pihak.

3.4.3. Restorasi Situs arkeologi di wilayah Selatan seperti dengan merawat pemulihan kota-kota kuno lainnya di Thailand seperti Sukhothai dan Adudhaya. Sebaliknya di wilayah Selatan jarang adanya proyek-proyek dalam hal pembangunan, penggalian, pencarian pengetahuan, kebenaran, sejarah dan arkeologi. Menurut Hattha, ia menyarankan pemerintah harus mengadakan lebih banyak restorasi di wilayah Selatan.

3.4.4. Membentuk museum kota, museumnya harus memuat informasi sejarah mereka dan mengadakan pameran tentang sejarah di museum tersebut. Selama ini, mereka sebagai masyarakat Melayu masih belum memiliki tempat untuk mempelajari sejarah mereka sendiri [CITATION Hat09 \l 1033 ].

Mempertimbangkan empat saran dari Hattha, peneliti melihat bahwa penting bagi pemerintah membentuk sebuah kognitif yang saling mengakui oleh semua pihak, agar mencapai kepada perasan we-ness dan we- feeling bersama.

3.4.5. Media, media-media merupakan alat yang penting bagi negara dalam menyebarkan sesuatu. Selama ini media-media belum merubahkan kata-kata “Penjahat Selatan” dan “Ekstrimis Selatan” kata “Selatan” di belakang kata penjahat tersebut dipahami oleh masyarakat di wilayah lainnya bahwa mayoritas dari masyarakat Selatan memiliki pikiran yang ekstrimis, sebaliknya bukan semua

masyarakat di wilayah Selatan memiliki pikiran yang ekstrimis tersebut. Pengaruh dari media tersebut mengakibatkan kesalahpahaman masyarakat wilayah lain terhadap masyarakat Selatan tersebut berubah menjadi diskriminasi.

Pada tahap ini, pemerintah perlu mengubah sistem media atau mengubah *discourse* yang di presentasikan oleh media sebelumnya agar masyarakat seluruh Thailand memiliki pemahaman yang sama untuk menghindari kesalahpahaman yang akan menunjukan kepada perasaan diskriminasi.

Pola penyelesaian konflik di suatu daerah tak mungkin diterapkan di daerah lain. Oleh karena itu, dalam menentukan langkah penyelesaian berbagai peristiwa konflik perlu dicermati dan dianalisis, tidak saja berdasarkan teori-teori konflik universal, tetapi perlu juga menggunakan paradigma nasional atau lokal agar objektivitas tetap berada dalam bingkai kondisi, nilai, dan tatanan kehidupan bangsa kita. Faktor-faktor sebagai pendukung analisis pemecahan konflik tersebut antara lain: aktornya, isu, faktor penyebab, lingkupnya, usaha lain yang pernah ada, jenis konflik, arah/potensi, sifat kekerasan, wilayah, fase dan intensitas, kapasitas dan sumbernya, alatnya, keadaan hubungan yang bertikai, dan sebagainya.

Cara penyelesaian konflik lebih tepat jika menggunakan model-model penyelesaian yang disesuaikan dengan kondisi wilayah serta budaya setempat. penyelesaian tersebut dilakukan atas inisiatif penuh dari masyarakat bawah yang masih memegang teguh adat lokal serta sadar akan pentingnya budaya lokal dalam menjaga dan menjamin keutuhan masyarakat